



# **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2021**



# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### **1.1.1. Latar Belakang**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mengemban 2 (dua) krida dari Hasta Krida Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;

Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah meningkatkan produksi tanaman pertanian, meningkatkan penguatan cadangan pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan utama. Sedangkan

Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian, meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, meningkatnya produksi tanaman perkebunan serta meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian dan akses pasar.

Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

#### 1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

#### 1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

#### 1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;

- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

#### 1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas: (1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; (3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; (4) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota; (5) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; (6) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; (7) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota; (8) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; (9) Pembangunan Prasarana Pertanian; dan (10) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

1.1.5.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2021 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
  - a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
    - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik;

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
  - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan :
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
    - 2) Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
    - 3) Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dari Toko Tani Indonesia;
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi :
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
    - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;
    - 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota :
    - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota :
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
  - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian :
    - 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
    - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
  - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota :
    - 1) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman;

6. Program Penyuluhan Pertanian

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- 3) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- 5) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
  - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota :
    - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
    - 2) Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### 2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

#### b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit :

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan kebijakan dan prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan

permasalahan-permasalahan dan mengatasi resiko-resiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

#### 2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

#### **3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian**

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Cukup Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas seluruh sub unsur cukup memadai. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan pada 2 sub unsur yang ada yaitu :

1) Pada Sub unsur Komitmen terhadap kompetensi

- Kelemahan :
  - a. Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.

2) Pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

- Kelemahan :
  - a. OPD belum menginternalisasi budaya sadar risiko;
  - b. Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja).

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu :

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	<b>Komitmen terhadap Kompetensi</b>		
	Melaksanakan sosialisasi budaya sadar resiko kepada seluruh ASN	Kepala Dinas	Triwulan I 2021
	Melaksanakan pelatihan terkait pengelolaan resiko secara berkala	Kepala Dinas	Triwulan IV 2021
2	<b>Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang pembinaan Sumber Daya Manusia</b>		
	Penyusunan kebijakan dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia	Kepala Dinas	Triwulan I 2021
	Pembuatan SOP yang mengatur tentang <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Pegawai	Kepala Dinas	Triwulan II 2021

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

*Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

*Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas*

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### 4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;

- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mendukung misi ke-3 dan ke-4 Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

- a) misi ke-3 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan”
- b) misi ke-4 “Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedalutan Pangan”

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan dan Perikanan

		b. Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui sektor agribisnis	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama	1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama 2. Persentase Penguatan Cadangan Pangan
		<b>(Tujuan dalam RPJMD)</b>	<b>(Sasaran dalam RPJMD)</b>	
2.	Risiko strategis OPD	Meningkatkan penguatan cadangan pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Penguatan cadangan pangan
		Meningkatkan ketersediaan pangan utama	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	Persentase Ketersediaan Pangan Utama
		Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian
			Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan	
			Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	
			Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian, dan akses pasar	

		<b>(Tujuan dalam Renstra DINPERTAN KP Kab. Banyumas)</b>	<b>(Sasaran dalam Renstra DINPERTAN KP Kab. Banyumas)</b>	
3.	Risiko operasional/ Kegiatan OPD	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi kemandirian pangan
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		1. Jumlah kegiatan Penetapan target konsumsi pangan 2. Jumlah Kegiatan Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah desa rawan pangan yang ditangani
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pembinaan dan survey pengamanan pangan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		-
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1. Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk pembinaan kelembagaan petani yang dilaksanakan

				<p>2. Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan</p> <p>3. Jumlah kegiatan Training Penyuluh Pertanian</p> <p>4. Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa melalui penyuluhan pertanian</p>
		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Jenis Infrastruktur di Bidang Pertanian
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten
		<b>(Kegiatan dalam Renja DINPERTAN KP Kab. Banyumas)</b>		

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda*

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD*

*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten  
Banyumas*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas*

#### 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut :

No	Pernyataan Risiko
<b>A</b>	<b>Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>
1	Belum dikembangkannya komoditas unggulan daerah
2	Rendahnya mutu pengolahan hasil pertanian
3	Belum adanya cadangan pangan daerah yang memadai

<b>B</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>
1	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan
2	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah
3	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
4	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman
5	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan
6	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif
7	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan
8	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura
9	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang
10	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis
<b>C</b>	<b>Risiko Operasional/Kegiatan OPD</b>
<b>Penanganan Daerah rawan Pangan</b>	
1	Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan
2	Tidak tertanganinya masyarakat terdampak rawan pangan
3	Kurangnya kemampuan produktif sumberdaya manusia
<b>Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk Kegiatan Pertanian</b>	
1	Kebutuhan masyarakat TNI TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi
<b>Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan</b>	
1	Kurang optimalnya kelembagaan Lumbung Pangan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
<b>Pengembangan Cadangan Pangan Daerah</b>	
1	Terbatasnya gudang cadangan pangan pemerintah

<b>Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan</b>	
1	Kurangnya sarana prasarana pengemangan pangan dan diversifikasi pangan
2	Kurangnya respon masyarakat
3	Kurangnya kemampuan petugas pengelola
4	Minat kepesertaan lomba masih rendah
<b>Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>	
1	Kurangnya kesadaran masyarakat
<b>Penyusunan Pola Pangan Harapan</b>	
1	Kurangnya data yang dibutuhkan
<b>Pengembangan Mekanisasi Pertanian</b>	
1	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Petani
2	Kurangnya pemanfaatan kelompok tani/kelembagaan petani
3	Rendahnya kesadaran pemeliharaan alat mesin pertanian
<b>Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian</b>	
1	Kekurangan air pertanian
2	Masih banyaknya sawah tadah hujan
<b>DAK Pertanian</b>	
1	Kekurangan air pertanian
2	Masih banyaknya sawah tadah hujan
<b>Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian</b>	
1	Kurangnya pelaksanaan Bintel dan Pembekalan bagi Penyuluh Pertanian (PPL)
2	Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan Penyuluh Pertanian
3	Kurangnya pelayanan Penyuluh Pertanian
<b>Penyusunan Programa Penyukuhan Pertanian</b>	
1	Kurangnya partisipasi aktif pelaku usahan dalam menyusun programa

<b>Pengembangan BPP Kecamatan</b>	
1	Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP
<b>Peningkatan Kemampuan Petani dan Kelembagaan petani</b>	
1	Kurangnya partisipasi aktif dari petani
2	Pengelolaan usaha anggota bersifat individual
<b>Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP</b>	
1	Terbatasnya jumlah petugas Penyuluh Pertanian yang terampil
<b>Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian</b>	
1	Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT dan pelaku agribisnis
2	Kurang berkembang pelaku agribisnis
<b>Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</b>	
1	Kurangnya kesempatan pengamatan serangan OPT
2	Menurunnya jumlah musuh alami OPT
3	Meningkatnya resistensi OPT
4	Tidak adanya perubahan pola tanam sehingga siklus serangan tidak terputus
5	Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu
<b>Peningkatan Perkebunan TanamanTahunan</b>	
1	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya tanaman tahunan
2	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat
3	Terbatasnya kelompok tani komoditas eprkebunhan yang aktif
<b>Pengembangan Perkebunan tanaman Semusim dan Rempah</b>	
1	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya
2	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat
3	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani

<b>Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan</b>	
1	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya
2	Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif
3	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani
<b>Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau</b>	
1	Tingginya harga pupuk khusus tembakau
2	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani
<b>Pengembangan Pertanian Hortikultura</b>	
1	Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura
2	Kurangnya kemampuan dan pengetahuan petani
<b>Pengembangan Pertanian Tanaman pangan</b>	
1	Kurangnya kemampuan ekonomi
2	Kurangnya kemampuan dan pengetahuan petani
<b>Operasional Balai Benih Pertanian</b>	
1	Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian
2	Kurangnya jumlah SDM teknis pembibitan
<b>Pemutakhiran Data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah</b>	
1	Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I

:

*Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis  
Pemerintah Daerah*

*Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD*

*Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD*

### 4.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

##### a. Risiko Strategis Pemerintah Daerah

No	Level Risiko	Risiko
1	Rendah	Belum dikembangkannya komoditas unggulan daerah
2	Rendah	Rendahnya mutu pengolahan hasil pertanian
3	Sedang	Belum adanya cadangan pangan pemerintah daerah yang memadai

##### b. Risiko Strategis OPD

No	Level Risiko	Risiko
1	Rendah	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan
2	Rendah	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah
3	Rendah	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
4	Sedang	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman
5	Tinggi	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan
6	Sedang	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif

No	Level Risiko	Risiko
7	Sedang	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan
8	Sedang	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura
9	Sedang	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang
10	Sedang	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis

c. Risiko Operasional OPD

No	Level Risiko	Risiko
1.	Sangat Tinggi	-
2.	Tinggi	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan
3.	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyaknya sawah tadah hujan</li> <li>2. Kekurangan air pertanian</li> <li>3. Tidak adanya perubahan pola tanam sehingga siklus serangan hama tidak terputus</li> <li>4. Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu</li> </ol>
4.	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan</li> <li>2. Kebutuhan masyarakat di lokasi TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi</li> <li>3. Kurangnya respon masyarakat</li> <li>4. Minat kepesertaan lomba masih rendah</li> <li>5. Kurang berkebangnya pelaku agrobisnis</li> <li>6. Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani</li> </ol>

No	Level Risiko	Risiko
5.	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tertanganinya masyarakat terdampak daerah rawan pangan</li> <li>2. Kurangnya kemampuan produktif sumber daya manusia</li> <li>3. Kurang optimalnya kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan Lembaga distribusi pangan masyarakat</li> <li>4. Terbatasnya gudangan cadangan pangan pemerintah</li> <li>5. Kurangnya sarana prasarana pengembangan dan diversifikasi pangan</li> <li>6. Kurangnya kemampuan petugas pengelola</li> <li>7. Belum tersusunnya Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan</li> <li>8. Kurangnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan</li> <li>9. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia petani dalam mekanisasi pertanian</li> <li>10. Kurangnya pemanfaatan kelompok tani/kelembagaan petani</li> <li>11. Rendahnya kesadaran pemeliharaan alsintan</li> <li>12. Kurangnya air pertanian</li> <li>13. Kurangnya pelaksanaan bintek dan pembekalan teknis bagi PPL</li> <li>14. Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan PPL</li> <li>15. Kurangnya pelayanan PPL</li> <li>16. Kurangnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam menyusun program</li> <li>17. Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP</li> </ol>

		<p>18. Kurangnya partisipasi aktif petani dalam kelembagaan petani</p> <p>19. Pengelolaan usaha anggota bersifat individual</p> <p>20. Terbatasnya jumlah petugas penyuluh pertanian yang terampil</p> <p>21. Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT pelaku agribisnis</p> <p>22. Kurangnya kesempatan pengamatan serangan OPT</p> <p>23. Menurunnya jumlah musuh alami OPT</p> <p>24. Meningkatnya resistensi OPT</p> <p>25. Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya tanaman perkebunan</p> <p>26. Terbatasnya bibit unggul bersertifikat</p> <p>27. Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani</p> <p>28. Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif</p> <p>29. Tingginya harga pupuk khusus tembakau</p> <p>30. Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura</p> <p>31. Kurangnya kemampuan pengetahuan petani tentang budidaya tanaman hortikultura</p> <p>32. Kurangnya kemampuan ekonomi petani tanaman pangan</p> <p>33. Kurangnya kemampuan pengetahuan petani tentang budidaya tanaman pangan</p> <p>34. Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian pada UPT Balai Benih Pertanian</p>
--	--	--

		<p>35. Kurangnya jumlah SDM teknis perbenihan pada UPT Balai Benih Pertanian</p> <p>36. Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi Perencanaan.</p>
--	--	---

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4 : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran :

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun

perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat,

pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2021 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2021 ketika akan merealisasikan RTP.*

## BAB VII

### PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

*Pemantauan dilakukan pada bulan Februari – Maret Tahun 2022.*

*Laporan tersebut disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas paling lambat bulan April Tahun 2022.*

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, November 2020

**PII KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**Ir. WIDARSO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620728 198901 1 001

# LAMPIRAN



NO	PERTANYAAN/KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN																																														MODUS	SIMPULAN KUISIONER CEE						
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46			R47					
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3,0				
<b>V</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>																																																				<b>3,0</b>	<b>Cukup Memadai</b>	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	1	4	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0				
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	1	4	3	4	4	4	3	3	3	1	2	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0					
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	1	4	3	4	4	4	3	3	3	1	2	3	4	2	3	4	4	4	2	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3,0					
<b>VI</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																																																				<b>3,0</b>	<b>Cukup Memadai</b>	
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3	1	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3,0				
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	2	4	3	2	3	2	3	3	1	4	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	4	2	3	3	4	4	2	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,0					
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	2	2	2	4	3	3	3	3	2	4	2	4	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3,0				
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	1	4	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0				
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	1	3	3	3	3	2	3	4	1	4	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	1	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3,0						
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	4	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	4	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0				
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	1	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4	4	2	4	4	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	2	3,0						
<b>VII</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>																																																					<b>3,0</b>	<b>Cukup Memadai</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	1	4	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0					
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	1	4	3	4	4	4	3	4	4	1	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0				
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	1	4	3	4	4	4	3	3	3	1	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3,0					
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	4	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	4	3	4	2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0			
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0				
<b>VIII</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>																																																					<b>3,0</b>	<b>Cukup Memadai</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	1	4	3	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,0				
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	4	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3,0				

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian		: 2021		
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pertanian dan Pangan		
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	LHP Inspektorat Nomor 700/736/2019	Terdapat PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja	Telah dilakukan pembinaan secara rutin kepada PNS untuk meningkatkan disiplin kerja	Penegakan integritas dan nilai etika
2		Belum adanya reward bagi PNS yang telah menaati ketentuan jam kerja	Telah diberikan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja	Penegakan integritas dan nilai etika

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2021							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang memadai	Terdapat PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja	Cukup memadai	Penegakan integritas dan nilai etika sudah diterapkan	Kurang memadai	Pemberian memadainya pembinaan dan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku kepada semua pegawai
2		Kurang memadai	Belum adanya reward bagi PNS yang telah menaati ketentuan jam kerja	Cukup memadai	Penegakan integritas dan nilai etika sudah diterapkan	Kurang memadai	Belum adanya SOP yang mengatur pemberian reward dan punishment secara seimbang

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2021	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten BANYUMAS Tahun 2018-2023	
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat
	Tujuan 3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan
	Tujuan 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian
	Tujuan 5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis
	Tujuan 6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja
	Tujuan 7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	Tujuan 8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
	Tujuan 9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	
Nama Dinas Terkait	DINPERINDAG	
	DINKANNAK	
	DINPERTAN KP	
Sasaran RPJMD	Sasaran 1.1	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa
	Sasaran 1.2	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani
IKU Sasaran RPJMD	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kelembagaan Petani	
	2. Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan	
	3. Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	
	4. Program Perlindungan Tanaman	
	5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran	
	6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	
	7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	
	8. Program Penyediaan Benih Pertanian	
	9. Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	
	Sasaran 1.2 Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	
	1. Program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kelembagaan Petani	
	2. Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan	
	3. Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	
	4. Program Perlindungan Tanaman	
	5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran	
	6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	
	7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	
	8. Program Penyediaan Benih Pertanian	
9. Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian		
<b>Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda</b>	<b>Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis</b>	
Nama Dinas Terkait	DINPERTAN KP	
Sasaran RPJMD	Sasaran 1.1	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama
IKU Sasaran RPJMD	1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	
	2. Persentase Penguatan Cadangan Pangan	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	
	2. Program Penguatan Cadangan Pangan	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	
	Sasaran 1.2 Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	
	1. Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	
	2. Program Penguatan Cadangan Pangan	

Purwokerto, November 2020

**PI. KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**Ir. WIDARSO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620728 198901 1 001

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2021		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pertanian dan Pangan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas		
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan penguatan cadangan pangan		
	2. Meningkatkan ketersediaan pangan utama		
	3. Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian		
Sasaran Strategis	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan		
IKU Renstra OPD		<b>IKU</b>	<b>2023</b>
	1	Persentase Penguatan cadangan pangan	86
	2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	97
	3	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	1
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Tujuan Strategis :</b>		
	1. Meningkatkan penguatan cadangan pangan		
	2. Meningkatkan ketersediaan pangan utama		
	3. Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian		
	<b>Sasaran Strategis:</b>		
	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan		
	2. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor		
	3. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan		
	4. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura		
	5. Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian, dan		
	<b>IKU Strategis:</b>		
	- Persentase Penguatan cadangan pangan		
	- Persentase Ketersediaan Pangan Utama		
	- Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian		
Purwokerto, November 2020			
 <p><b>Pt. KEPALA DINAS DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS</b></p>			
<b>Jr. WIDARSO, MM.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19620728 198901 1 001			

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2020	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pertanian dan Pangan	
OPD yang Dinilai	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	
Sumber Data	Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021	
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan penguatan cadangan pangan	
	2. Meningkatkan ketersediaan pangan utama	
	3. Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian	
Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Renja 2021) dan Kegiatan Utama	<b>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</b>	
	a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan	
	<b>2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	
	a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
	<b>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	
	a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	<b>4. Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	
	a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	
	a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
	b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	
	<b>6. Program Penyuluhan Pertanian</b>	
	a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
	7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
	<b>8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	
a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.a Jumlah lokasi kemandirian pangan	
	2.a Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	2.b.1 Jumlah kegiatan Penetapan target konsumsi pangan	
	2.b.2 Jumlah Kegiatan Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan	
	3.a Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	
	4.a Jumlah pelaksanaan pembinaan dan survey pengamanan pangan	
	5.b. Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten	
	6.a.1 Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk pembinaan kelembagaan petani yang dilaksanakan	
	6.a.2 Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	

	6.a.3 Jumlah kegiatan Training Penyuluh Pertanian		
	6.a.4 Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa melalui penyuluhan pertanian		
	7.a Jumlah Jenis Infrastruktur di Bidang Pertanian		
	8.a Jumlah Jenis Infrastruktur di Bidang Pertanian		
Informasi Lain	-		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan	Kegiatan	Indikator	
	Penyediaan Infrastruktur dan Penyediaan dan Penyaluran	Jumlah lokasi kemandirian pangan	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan	
		Jumlah kegiatan Penetapan target konsumsi pangan	
		Jumlah Kegiatan Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan	
	Penanganan Kerawanan	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	
	Pelaksanaan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan survey	
	Pengawasan Penggunaan	-	
	Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik	
	Pelaksanaan Penyuluhan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	
		Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan	
		Jumlah kegiatan Training Penyuluh Pertanian	
		Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas	
Pembangunan Prasarana	Jumlah Jenis Infrastruktur di Bidang Pertanian		
Pengendalian dan	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan		
	<p style="text-align: center;">Purwokerto, November 2020</p>  <p style="text-align: center;"><b>Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ir. WIDARSO, MM.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19620728 198901 1 001</p>		



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sasaran 1.1									
	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Rendahnya mutu pengolahan hasil pertanian		Kepala Daerah	Pembinaan pengolahan pangan belum maksimal	Internal	C	Kurangnya ketersediaan pangan utama	Masyarakat
		2. Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Belum adanya cadangan pangan pemerintah daerah yang memadai		Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan	Internal	C	Kurangnya ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Nama OPD	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2020
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun 2018-2023)
Tujuan Strategis	: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Peertanian dan Pangan
OPD yang Dinilai	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	<b>Tujuan :</b>									
	1. Meningkatkan penguatan cadangan pangan									
	2. Meningkatkan ketersediaan pangan utama									
	3. Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian									
	<b>Sasaran Strategis OPD</b>									
	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan		Kepala Dinas	Belum dilakukannya Survey Pola Pangan Harapan (PPH) secara periodik	Internal	C	Terhambatnya penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
		2 . Prosentase Penguatan Cadangan Pangan	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah		Kepala Dinas	Terbatasnya sarana dan prasarana serta pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah	Internal	C	Gudang cadangan pangan pemerintah yang ada tidak beroperasi	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
	2. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	1. Persentase Dukungan Asuransi Usaha Tani Padi	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)		Kepala Dinas	Kurangnya sosialisasi kepada petani tentang AUTP	Internal	C	Hanya sebagian lahan pertanian yang dilindungi oleh AUTP	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
		2. Persentase penurunan angka kerusakan tanaman	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman		Kepala Dinas	Faktor iklim dan serangan OPT yang tidak dapat dikendalikan	Eksternal	UC	Meningkatnya lahan pertanian yang mengalami gagal panen	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		3. Persentase penurunan angka luasan kekeringan	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan		Kepala Dinas	Faktor iklim yang tidak dapat dikendalikan	Eksternal	UC	Meningkatnya lahan pertanian yang mengalami gagal panen	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
	3. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif		Kepala Dinas	Terbatasnya bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	Eksternal	C	Produksi perkebunan masih rendah	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
	4. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan		Kepala Dinas	Kurangnya bimbingan tekni budidaya tanaman pangan	Internal	C	Produksi Tanaman pangan belum optimal	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
		2. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura		Kepala Dinas	Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura	Eksternal		Produksi hortikultura masih terbatas	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
	5. Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian, dan akses pasar	1. Persentase Cakupan Bina Kelompok Petani	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang		Kepala Dinas	Kurangnya pembinaan bagi kelompok tani terutama dalam hal manajemen	Internal	C	Pengelolaan usaha tani belum tertata dengan baik	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
		2. Persentase Pendampingan kelompok tani pelaku usaha agribisnis	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis		Kepala Dinas	Kurangnya pembinaan terhadap kelompok tani pelaku usaha agribisnis	Internal	C	kelompok tani pelaku usaha agribisnis tidak berkembang	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Penilaian : 2020 Periode yang dinilai : 2021 Tujuan Strategis : Sasaran strategis OPD : Urusan Pemerintahan : Urusan Pertanian dan Pangan OPD yang Dinilai : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Perencanaan	Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan		Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Rendahnya daya beli masyarakat	Eskternal	UC	Tingginya daerah rawan pangan	Masyarakat
			Perencanaan	Tidak tertanganinya masyarakat terdampak daerah rawan pangan		Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Rendahnya akses pangan pada masyarakat	Masyarakat OPD terkait
			Perencanaan	Kurangnya kemampuan produktif sumberdaya manusia		Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan keuangan daerah	Eskternal	UC	Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat	Masyarakat
2	Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk Pertanian	Jumlah pelaksanaan pasar murah	Perencanaan	Kebutuhan masyarakat di lokasi TNI TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi		Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	adanya regulasi tentang tatacara belanja hibah kepada masyarakat,	Internal	C	bentuk peran serta dalam kegiatan TNI TMMD berupa subsidi harga	Masyarakat

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
3	Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan	1. Jumlah pelaksanaan pembinaan masyarakat di desa mandiri pangan dan anggota lumbung pangan serta masyarakat rawan pangan lainnya 2. Jumlah penguatan cadangan pangan	Pelaksanaan	Kurang optimalnya kelembagaan Lumbung Pangan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat		Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Keterbatasan sarana prasarana dan sumberdaya manusia lembaga pangan	Internal	C	Menurunnya kualitas dan kuantitas pengelolaan cadangan pangan	Masyarakat
4	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah pelaksanaan survey pengembangan cadangan pangan daerah	Pelaksanaan	Terbatasnya gudang cadangan pangan pemerintah		Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Keterbatasan sarana prasarana dan sumberdaya manusia lembaga pangan	Internal	C	Menurunnya kualitas dan kuantitas pengelolaan cadangan pangan	Masyarakat
5	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan	1. Jumlah keragaman komoditas pangan yang dikembangkan 2. Luas pekarangan yang digunakan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan		Kurangnya sarana prasarana pengembangan pangan dan diversifikasi pangan		Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kurangnya kreatifitas masyarakat	Eksternal	C	tidak berkembangnya inovasi pemanfaatan lahan	Masyarakat
				Kurangnya respon masyarakat		Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Keterbatasan kesempatan sosialisasi	Internal	C	jawaban responden kurang dapat mewakili pengambilan kesimpulan analisis	Masyarakat
				Kurangnya kemampuan petugas pengelola		Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Keterbatasan pelatihan	Internal	C	Data yang tersaji kurang validitasnya	Masyarakat
				Minat kepesertaan lomba masih rendah		Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan pesreta	Eksternal	C	Variasi diversifikasi pangan masih kurang	Masyarakat

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6	Penyusunan Pola Pangan Harapan	1. Jumlah pelaksanaan survey konsumsi energi per kapita per hari 2. Jumlah pelaksanaan survey konsumsi protein per kapita per hari		Belum Tersusunnya Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan		Seksi Konsumsi dan Kemanan Pangan	Belum dilakukan survey PPH secara periodik	Internal	C	Terhambatnya penyusunan pola pangan harapan dan neraca bahan makanan	Masyarakat
7	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan survey pwnngamanan pangan		Kurangnya kesadaran masyarakat		Seksi Konsumsi dan Kemanan Pangan	Keterbatasan kesempatan menerima ilmu pengetahuan / mengikuti pembinaan	Eksternal	UC	Kurangnya keanekaragaman pangan dan rendahnya mutu dan keamanan pangan	Masyarakat
8	Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Jumlah jenis alat mesin pertanian		Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia Petani		Seksi Sarana Prasarana	Usia petani relatif tua	Eksternal	UC	penggunaan sarana pertanian yang konvensional	Masyarakat
				Kurangnya pemanfaatan kelompok tani / kelembagaan petani		Seksi Sarana Prasarana	Tingkat keaktifan kelompok masih rendah	Eksternal	C	Kelompok tani belum berfungsi secara maksimal	Masyarakat
				Rendahnya kesadaran pemeliharaan alat mesin pertanian		Seksi Sarana Prasarana	Tingkat pengetahuan pemeliharaan alsintan yang rendah	Eksternal	C	alat mesin pertanian yang ada, tidak terawat dan tidak dapat difungsikan	Masyarakat
9	Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian	Jumlah Jenis Infrastruktur di Bidang Pertanian		Kekurangan air pertanian		Seksi Sarana Prasarana	Tidak tersedianya sumber air pertanian	Eksternal	UC	Pertanaman padi maksimal 2 kali setahun	Masyarakat
				Masih banyaknya sawah tadah hujan		Seksi Sarana Prasarana	Terlalu jauh dari sumber air permukaan	Eksternal	UC	Rendahnya tingkat produksi	Masyarakat
10	DAK Pertanian	Jumlah jenis sarana prasarana bidang pertanian		Kekurangan air pertanian		Seksi Sarana Prasarana	Tidak tersedianya sumber air pertanian	Eksternal	UC	Pertanaman padi maksimal 2 kali setahun	Masyarakat
				Masih banyaknya sawah tadah hujan		Seksi Sarana Prasarana	Terlalu jauh dari sumber air permukaan	Eksternal	UC	Rendahnya tingkat produksi	Masyarakat
11	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti training		Kurangnya pelaksanaan BinteK dan pembekalan teknis bagi PPL		Seksi Penyuluhan Pertanian	Kurangnya anggaran untuk BinteK dan pembekalan teknis	Internal	C	Rendahnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian	Masyarakat dan OPD

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan Penyuluh Pertanian		Seksi Penyuluhan Pertanian	Penyuluh jarang mengikuti pendidikan dan latihan dan pembinaan karir bagi penyuluh	Internal	C	Materi penyuluhan pertanian yang dikuasai terbatas	Masyarakat dan OPD
				Kurangnya pelayanan Penyuluh Pertanian		Seksi Penyuluhan Pertanian	Kurang sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Internal	C	Materi Penyuluh Pertanian yang terbatas	Masyarakat
12	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan Perikanan	Jumlah kecamatan yang menyusun buku program penyuluhan tingkat BPP		Kurangnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam menyusun program		Seksi Penyuluhan Pertanian	Kurangnya pendampingan yang kontinyu	Internal	C	Rendahnya kualitas rencana kegiatan pelaku usaha	Pelaku Usaha Tani
13	Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP Model		Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP		Seksi Penyuluhan Pertanian	Terbatasnya anggaran	Internal	C	Terhambatnya proses administrasi dan operasional BPP	BPP Masyarakat
14	Peningkatan Kemampuan Petani dan Lembaga Petani	1. Jumlah demplot yang terbentuk 2. Jumlah kecamatan peserta pertemuan KTNA, P4S, KWT, Gapoktan		Kurangnya partisipasi aktif dari petani		Seksi Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan petani terbentuk karena berorientasi bantuan pemerintah	Internal	C	Aktifitas kelembagaan petani masih sulit ditingkatkan	Masyarakat (Petani)
				Pengelolaan usaha anggota bersifat individual		Seksi Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan petani kurang mawadahi kebutuhan anggotanya	Eksternal	C	Terjadinya kesulitan modal, ketidakstabilan harga dan terjadinya pemasaran yang terbatas	Masyarakat
15	Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP	Jumlah kelembagaan P3 dan GP3A yang terbina		Terbatasnya jumlah petugas penyuluh pertanian yang terampil		Seksi Penyuluhan Pertanian	Analisis Beban Kerja perlu di kaji karena kurangnya jumlah petugas penyuluh	Internal	C	Rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani	Masyarakat OPD

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
16	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	1. Jumlah kegiatan promosi dan pameran yang diikuti atau dilaksanakan 2. Jumlah KWT dan Pelaku Usaha Pertanian peserta pelatihan dan pembinaan		Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT, Pelaku Agribisnis		Seksi Bina Usaha	Rasio antara jumlah petugas penyuluh dengan KWT dan Pelaku Agribisnis terlalu tinggi	Internal	C	Terdapat KWT dan pelaku Agribisnis yang belum menerima pembinaan dan pelatihan	Masyarakat (KWT dan Pelaku Agribisnis)
				Kurang berkembangnya pelaku agribisnis		Seksi Bina Usaha	Rendahnya kemampuan ekonomi dan informasi pelaku usaha	Eksternal	C	laju pertumbuhan usaha agribisnis yang rendah	Masyarakat (Pelaku Usaha)
17	Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah jenis sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman		Kurangnya kesempatan pengamatan serangan OPT		Seksi Perlindungan Tanaman	Usaha pertanian merupakan pekerjaan sampingan	Eksternal	C	Adanya serangan OPT pertanian sepanjang pertanaman	Masyarakat (Petani)
				Menurunnya jumlah musuh alami OPT		Seksi Perlindungan Tanaman	Perburuan musuh alami OPT oleh manusia	Eksternal	C	Meningkatnya jumlah serangan OPT	Masyarakat (Petani)
				Meningkatnya resistensi OPT		Seksi Perlindungan Tanaman	Penggunaan obat-obatan kimia pembasmi OPT dalam jangka waktu yang lama	Eksternal	C	Keterlambatan deteksi adanya serangan OPT pertanian	Masyarakat (Petani)
				Tidak ada perubahan pola tanam sehingga siklus serangan tidak terputus		Seksi Perlindungan Tanaman	Rendahnya pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu	Eksternal	C	Produksi menurun akibat serangan	Masyarakat (Petani)
				Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu		Seksi Perlindungan Tanaman	Perubahan iklim yang tidak menentu	Eksternal	UC	Produksi menurun akibat serangan	Masyarakat (Petani)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
18	Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan	1. Jumlah benih kelapa kopyor yang tersedia 2. Jumlah arit deres yang tersedia 3. Jumlah safety belt yang tersedia 4. Jumlah Peserta pelatihan 5. Jumlah bibit kopi yang tersedia 6. Jumlah pongkor nira yang tersedia 7. Jumlah pupuk organik yang tersedia		Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya tanaman tahunan		Seksi Tanaman Tahunan	Rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani dan banyaknya komoditas pertanian yang diusahakan petani	Eksternal	UC	Produksi tanaman tahunan perkebunan menjadi terbatas	Masyarakat (Petani)
				Terbatasnya bibit unggul bersertifikat		Seksi Tanaman Tahunan	Terbatasnya tanaman induk penghasil bibit	Eksternal	C	Kuantitas dan kualitas produksi tanaman tahunan perkebunan menjadi rendah	Masyarakat (Petani)
				Terbatasnya kelompok tani komoditas perkebunan yang aktif		Seksi Tanaman Tahunan	Keterbatasan pengetahuan dan informasi petani	Eksternal	C	Petani perkebunan belum seluruhnya diwadahi dalam kelompok tani	Masyarakat (Petani)
19	Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Jumlah petani pala yang dibina 2. Jumlah petani lada yang dibina 3. Jumlah petani yang dibina		Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Pemanfaatan lahan pertanian oleh petani yang tidak memperhatikan pedoman teknis budidaya	Eksternal	UC	Tanaman tidak dapat tumbuh dengan optimal, sehingga produksi tidak optimal	Masyarakat (Petani)
				Terbatasnya bibit unggul bersertifikat		Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Terbatasnya kebun induk sebagai sumber penghasil bibit	Eksternal	UC	Bibit yang ditanam bukan bibit yang bersertifikat, sehingga kuantitas dan kualitas produksi tanaman perkebunan menjadi rendah	Masyarakat (Petani)
				Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Sebagian besar usia petani sudah lanjut	Eksternal	UC	Budidaya pertanian perkebunan yang konvensional dan tradisional	Masyarakat (Petani)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
20	Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan	1. Jumlah tanaman cengkeh yang diremajakan 2. Jumlah anggota kelompok yang dibina		Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Pemanfaatan lahan pertanian oleh petani yang tidak memperhatikan pedoman teknis budidaya	Eksternal	UC	Tanaman tidak dapat tumbuh dengan optimal, sehingga produksi tidak optimal	Masyarakat (Petani)
				Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif		Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	usia tanaman yang relatif tua dan rendahnya tingkat laju peremajaan tanaman	Eksternal	C	rendahnya tingkat produksi	Masyarakat (Petani)
				Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Sebagian besar usia petani sudah lanjut	Eksternal	UC	Budidaya pertanian perkebunan yang konvensional dan tradisional	Masyarakat (Petani)
21	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau	1. Luas lahan intensifikasi tembakau 2. Jumlah anggota kelompok yang dibina		Tingginya harga pupuk khusus tembakau		Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap sarana produksi	Eksternal	UC	Produksi kurang optimal dan kurang memenuhi standart pasar	Masyarakat (Petani)
				Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Sebagian besar usia petani sudah lanjut	Eksternal	UC	Budidaya pertanian perkebunan yang konvensional dan tradisional	Masyarakat (Petani)
22	Pengembangan Pertanian Hortikultura	1. Jumlah petani peserta pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman pisang 2. Jumlah petani peserta pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman durian 3. Jumlah petani peserta pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman cabai		Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura		Seksi Hortikultura	Kurangnya kemampuan ekonomi	Eksternal	UC	Tingkat produksi yang rendah	Masyarakat (Petani)
				Kurangnya kemampuan pengetahuan petani		Seksi Hortikultura	Keterbatasan sumberdaya manusia petani	Eksternal	UC	Budidaya tanaman hortikultura yang relatif tradisional dan konvensional	Masyarakat (Petani)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
23	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan			Kurangnya kemampuan ekonomi		Seksi Tanaman Pangan	Mahalnya harga sarana produksi	Eksternal	UC	Tingkat produksi dan produktivitas yang rendah	Masyarakat (Petani)
				Kurangnya kemampuan pengetahuan petani		Seksi Tanaman Pangan	Keterbatasan sumberdaya manusia petani	Eksternal	UC	Budidaya tanaman pangan yang relatif tradisional dan konvensional	Masyarakat (Petani)
24	Operasional Balai Benih Pertanian			Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian		UPT Balai Benih Pertanian	Kurangnya pelatihan / Diklat/ Bintek	Internal	C	Kurangnya jumlah dan kualitas produksi benih BBP	Masyarakat (Petani) Balai Benih Pertanian
				Kurangnya jumlah SDM teknis perbenihan		UPT Balai Benih Pertanian	Terbatasnya jumlah SDM teknis perbenihan sesuai anggaran pemerintah	Internal	C	Terhambatnya proses produksi perbenihan tanaman di BBP	Masyarakat (Petani) Balai Benih Pertanian
25	Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi			Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi		Subbag Perencanaan	Keterbatasan sumberdaya manusia pengelola	Internal	C	Data dan informasi yang kurang up to date	Masyarakat OPD

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2020
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pertanian dan Pangan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>					
1	Belum dikembangkannya komoditas unggulan daerah		2	3	6
2	Rendahnya mutu pengolahan hasil pertanian		2	4	8
3	Belum adanya cadangan pangan pemerintah daerah yang memadai		4	3	12
<b>II Risiko Strategis OPD</b>					
4	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan		2	3	6
5	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah		2	4	8
6	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)		3	3	9
7	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman		3	4	12
8	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan		4	4	16
9	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif		2	4	8
10	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan		2	4	8
11	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura		2	3	6
12	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang		2	4	8
13	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis		2	4	8
<b>Risiko Operasional OPD</b>					
<b>Penanganan Daerah Rawan Pangan</b>					
14	Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan		2	2	4
15	Tidak tertanganinya masyarakat terdampak daerah rawan pangan		2	3	6
16	Kurangnya kemampuan produktif sumberdaya manusia		3	3	9
<b>Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk Pertanian</b>					
17	Kebutuhan masyarakat di lokasi TNI TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi		1	3	3

a	b	c	d	e	f=dxe
	<b>Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan</b>				
18	Kurang optimalnya kelembagaan Lumbung Pangan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat		2	3	6
	<b>Pengembangan Cadangan Pangan Daerah</b>				
19	Terbatasnya gudang cadangan pangan pemerintah		2	3	6
	<b>Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan</b>				
20	Kurangnya sarana prasarana pengembangan pangan dan diversifikasi pangan		2	3	6
21	Kurangnya respon masyarakat		2	2	4
22	Kurangnya kemampuan petugas pengelola		3	2	6
23	Minat kepesertaan lomba masih rendah		2	2	4
	<b>Penyusunan Pola Pangan Harapan</b>				
24	Belum Tersusunnya Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan		2	3	6
	<b>Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>				
25	Kurangnya kesadaran masyarakat		3	2	6
	<b>Pengembangan Mekanisasi Pertanian</b>				
26	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia Petani		3	3	9
27	Kurangnya pemanfaatan kelompok tani / kelembagaan petani		2	4	8
28	Rendahnya kesadaran pemeliharaan alat mesin pertanian		3	3	9
	<b>Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian</b>				
29	Kekurangan air pertanian		3	3	9
30	Masih banyaknya sawah tadah hujan		3	4	12
	<b>DAK Pertanian</b>				
31	Kekurangan air pertanian		4	3	12
32	Masih banyaknya sawah tadah hujan		3	4	12
	<b>Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian</b>				
33	Kurangnya pelaksanaan Bintek dan pembekalan teknis bagi PPL		2	3	6
34	Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan Penyuluh Pertanian		2	3	6
35	Kurangnya pelayanan Penyuluh Pertanian		3	3	9
	<b>Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan</b>				
36	Kurangnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam menyusun program		2	3	6

a	b	c	d	e	f=dxe
	<b>Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian</b>				
37	Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP		2	3	6
	<b>Peningkatan Kemampuan Petani dan Lembaga Petani</b>				
38	Kurangnya partisipasi aktif dari petani		2	3	6
39	Pengelolaan usaha anggota bersifat individual		2	3	6
	<b>Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP</b>				
40	Terbatasnya jumlah petugas penyuluh pertanian yang terampil		2	3	6
	<b>Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</b>				
41	Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT, Pelaku Agribisnis		3	2	6
42	Kurang berkembangnya pelaku agribisnis		2	2	4
	<b>Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</b>				
42	Kurangnya kesempatan pengamatan serangan OPT		3	3	9
44	Menurunnya jumlah musuh alami OPT		3	3	9
45	Meningkatnya resistensi OPT		3	3	9
46	Tidak ada perubahan pola tanam sehingga siklus serangan tidak terputus		3	4	12
47	Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu		3	4	12
	<b>Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan</b>				
48	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		3	3	9
49	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat		3	3	9
50	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		3	3	9
	<b>Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah</b>				
51	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		3	3	9
52	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat		3	3	9
53	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		3	3	9
	<b>Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan</b>				
54	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		2	3	6
55	Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif		2	3	6
56	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		2	2	4

a	b	c	d	e	f=dxe
	<b>Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau</b>				
57	Tingginya harga pupuk khusus tembakau		3	3	9
58	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		2	3	6
	<b>Pengembangan Pertanian Hortikultura</b>				
59	Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura		2	3	6
60	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani		3	3	9
	<b>Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan</b>				
61	Kurangnya kemampuan ekonomi		2	3	6
62	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani		2	3	6
	<b>Operasional Balai Benih Pertanian</b>				
63	Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian		3	3	9
64	Kurangnya jumlah SDM teknis perbenihan		3	3	9
	<b>Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi</b>				
65	Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi		2	3	6

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas				
		: 2020				
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pertanian dan Pangan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemda</b>					
1	Belum dikembangkannya komoditas unggulan daerah		6	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran dan SDM yang mampu mengelola pengembangan komoditas pertanian	Kabupaten Banyumas belum memiliki komoditas khas yang beragam sesuai lokasi
2	Rendahnya mutu pengolahan hasil pertanian		8	Kepala Daerah	Pembinaan pengolahan pangan belum maksimal	Kurangnya ketersediaan pangan utama
3	Belum adanya cadangan pangan pemerintah daerah yang memadai		12	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan	Kurangnya ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
4	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan		6	Kepala Dinas	Belum dilakukannya Survey Pola Pangan Harapan (PPH) secara periodik	Terhambatnya penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan
5	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah		8	Kepala Dinas	Terbatasnya sarana dan prasarana serta pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah	Gudang cadangan pangan pemerintah yang ada tidak beroperasi
6	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)		9	Kepala Dinas	Kurangnya sosialisasi kepada petani tentang AUTP	Hanya sebagian lahan pertanian yang dilindungi oleh AUTP
7	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman		12	Kepala Dinas	Faktor iklim dan serangan OPT yang tidak dapat dikendalikan	Meningkatnya lahan pertanian yang mengalami gagal panen
8	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan		16	Kepala Dinas	Faktor iklim yang tidak dapat dikendalikan	Meningkatnya lahan pertanian yang mengalami gagal panen
9	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif		8	Kepala Dinas	Terbatasnya bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	Produkis perkebunan masih rendah

a	b	c	d	e	f	g
10	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan		8	Kepala Dinas	Kurangnya bimbingan teknis budidaya tanaman pangan	Produksi Tanaman pangan belum optimal
11	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura		6	Kepala Dinas	Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura	Produksi hortikultura masih terbatas
12	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang		8	Kepala Dinas	Kurangnya pembinaan bagi kelompok tani terutama dalam hal manajemen	Pengelolaan usah tani belum tertata dengan baik
13	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis		8	Kepala Dinas	Kurangnya pembinaan terhadap kelompok tani pelaku usaha agribisnis	kelompok tani pelaku usaha agribisnis tidak berkembang
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>					
	<b>Penanganan Daerah Rawan</b>					
14	Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan		4	Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Rendahnya daya beli masyarakat	Tingginya daerah rawan pangan
15	Tidak tertanganinya masyarakat terdampak daerah rawan pangan		6	Seksi Distribusi dan Ketersediaan	Keterbatasan anggaran	Rendahnya akses pangan pada masyarakat
16	Kurangnya kemampuan produktif sumberdaya manusia		9	Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan keuangan daerah	Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat
	<b>Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk Pertanian</b>					
17	Kebutuhan masyarakat di lokasi TNI TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi		3	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	adanya regulasi tentang tatacara belanja hibah kepada masyarakat,	bentuk peran serta dalam kegiatan TNI TMMD berupa subsidi harga
	<b>Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan</b>					
18	Kurang optimalnya kelembagaan Lumbung Pangan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat		6	Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Keterbatasan sarana prasarana dan sumberdaya manusia lembaga pangan	Menurunnya kualitas dan kuantitas pengelolaan cadangan pangan
	<b>Pengembangan Cadangan Pangan Daerah</b>					
19	Terbatasnya gudang cadangan pangan pemerintah		6	Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Keterbatasan sarana prasarana dan sumberdaya manusia lembaga pangan	Menurunnya kualitas dan kuantitas pengelolaan cadangan pangan
	<b>Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan</b>					

a	b	c	d	e	f	g
20	Kurangnya sarana prasarana pengembangan pangan dan diversifikasi pangan		6	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kurangnya kreatifitas masyarakat	tidak berkembangnya inovasi pemanfaatan lahan
	Kurangnya respon masyarakat		4	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Keterbatasan kesempatan sosialisasi	jawaban responden kurang dapat mewakili pengambilan kesimpulan analisis
	Kurangnya kemampuan petugas pengelola		6	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Keterbatasan pelatihan	Data yang tersaji kurang validitasnya
	Minat kepesertaan lomba masih rendah		4	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan pesreta	Variasi diversifikasi pangan masih kurang
	<b>Penyusunan Pola Pangan Harapan</b>					
21	Belum Tersusunnya Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan		6	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Belum dilakukan survey PPH secara periodik	Terhambatnya penyusunan pola pangan harapan dan neraca bahan makanan
	<b>Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>					
22	Kurangnya kesadaran masyarakat		6	Seksi Sarana Prasarana	Keterbatasan kesempatan menerima ilmu pengetahuan / mengikuti pembinaan	Kurangnya keanekaragaman pangan dan rendahnya mutu dan keamanan pangan
	<b>Pengembangan Mekanisasi Pertanian</b>					
23	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia Petani		9	Seksi Sarana Prasarana	Usia petani relatif tua	penggunaan sarana pertanian yang konvensional
24	Kurangnya pemanfaatan kelompok tani / kelembagaan petani		8	Seksi Sarana Prasarana	Tingkat keaktifan kelompok masih rendah	Kelompok tani belum berfungsi secara maksimal
25	Rendahnya kesadaran pemeliharaan alat mesin pertanian		9	Seksi Sarana Prasarana	Tingkat pengetahuan pemeliharaan alsintan yang rendah	alat mesin pertanian yang ada, tidak terawat dan tidak dapat difungsikan
	<b>Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian</b>					
26	Kekurangan air pertanian		9	Seksi Sarana Prasarana	Tidak tersedianya sumber air pertanian	Pertanaman padi maksimal 2 kali setahun

a	b	c	d	e	f	g
27	Masih banyaknya sawah tadah hujan		12	Seksi Sarana Prasarana	Terlalu jauh dari sumber air permukaan	Rendahnya tingkat produksi
	<b>DAK Pertanian</b>					
28	Kekurangan air pertanian		12	Seksi Penyuluhan Pertanian	Tidak tersedianya sumber air pertanian	Pertanaman padi maksimal 2 kali setahun
29	Masih banyaknya sawah tadah hujan		12	Seksi Penyuluhan Pertanian	Terlalu jauh dari sumber air permukaan	Rendahnya tingkat produksi
	<b>Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian</b>					
30	Kurangnya pelaksanaan Bintek dan pembekalan teknis bagi PPL		6	Seksi Penyuluhan Pertanian	Kurangnya anggaran untuk Bintek dan pembekalan teknis	Rendahnya kualitas SDM Penyuluh Pertanian
31	Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan Penyuluh Pertanian		6	Seksi Penyuluhan Pertanian	Penyuluh jarang mengikuti pendidikan dan latihan dan pembinaan karir bagi penyuluh	Materi penyuluhan pertanian yang dikuasai terbatas
	Kurangnya pelayanan Penyuluh Pertanian		9	Seksi Penyuluhan Pertanian	Kurang sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Materi Penyuluh Pertanian yang terbatas
	<b>Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan Perikanan</b>					
32	Kurangnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam menyusun program		6	Seksi Penyuluhan Pertanian	Kurangnya pendampingan yang kontinyu	Rendahnya kualitas rencana kegiatan pelaku usaha
	<b>Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian</b>					
33	Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP		6	Seksi Penyuluhan Pertanian	Terbatasnya anggaran	Terhambatnya proses administrasi dan operasional BPP
	<b>Peningkatan Kemampuan Petani dan Lembaga Petani</b>					
34	Kurangnya partisipasi aktif dari petani		6	Seksi Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan petani terbentuk karena berorientasi bantuan pemerintah	Aktifitas kelembagaan petani masih sulit ditingkatkan
35	Pengelolaan usaha anggota bersifat individual		6	Seksi Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan petani kurang mawadahi kebutuhan anggotanya	Terjadinya kesulitan modal, ketidakstabilan harga dan terjadinya pemasaran yang terbatas
	<b>Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP</b>					
36	Terbatasnya jumlah petugas penyuluh pertanian yang terampil		6	Seksi Penyuluhan Pertanian	Analisis Beban Kerja perlu di kaji karena kurangnya jumlah petugas penyuluh	Rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani

a	b	c	d	e	f	g
	<b>Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</b>					
37	Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT, Pelaku Agribisnis		6	Seksi Bina Usaha	Rasio antara jumlah petugas penyuluh dengan KWT dan Pelaku Agribisnis terlalu tinggi	Terdapat KWT dan pelaku Agribisnis yang belum menerima pembinaan dan pelatihan
38	Kurang berkembangnya pelaku agribisnis		4	Seksi Bina Usaha	Rendahnya kemampuan ekonomi dan informasi pelaku usaha	laju pertumbuhan usaha agribisnis yang rendah
	<b>Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</b>					
39	Kurangnya kesempatan pengamatan serangan OPT		9	Seksi Pelindungan Tanaman	Usaha pertanian merupakan pekerjaan sampingan	Adanya serangan OPT pertanian sepanjang pertanaman
40	Menurunnya jumlah musuh alami OPT		9	Seksi Pelindungan Tanaman	Perburuan musuh alami OPT oleh manusia	Meningkatnya jumlah serangan OPT
41	Meningkatnya resistensi OPT		9	Seksi Pelindungan Tanaman	Penggunaan obat-obatan kimia pembasmi OPT dalam jangka waktu yang lama	Keterlambatan deteksi adanya serangan OPT pertanian
42	Tidak ada perubahan pola tanam sehingga siklus serangan tidak terputus		12	Seksi Pelindungan Tanaman	Rendahnya pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu	Produksi menurun akibat serangan
43	Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu		12	Seksi Pelindungan Tanaman	Perubahan iklim yang tidak menentu	Produksi menurun akibat serangan
	<b>Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan</b>					
44	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya tanaman tahunan		9	Seksi Tanaman Tahunan	Rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani dan banyaknya komoditas pertanian yang diusahakan petani	Produksi tanaman tahunan perkebunan menjadi terbatas
45	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat		9	Seksi Tanaman Tahunan	Terbatasnya tanaman induk penghasil bibit	Kuantitas dan kualitas produksi tanaman tahunan perkebunan menjadi rendah
46	Terbatasnya kelompok tani komoditas perkebunan yang aktif		9	Seksi Tanaman Tahunan	Keterbatasan pengetahuan dan informasi petani	Petani perkebunan belum seluruhnya diwadahi dalam kelompok tani

a	b	c	d	e	f	g
	<b>Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah</b>					
47	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		9	Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Pemanfaatan lahan pertanian oleh petani yang tidak memperhatikan pedoman teknis budidaya	Tanaman tidak dapat tumbuh dengan optimal, sehingga produksi tidak optimal
48	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat		9	Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Terbatasnya kebun induk sebagai sumber penghasil bibit	Bibit yang ditanam bukan bibit yang bersertifikat, sehingga kuantitas dan kualitas produksi tanaman perkebunan menjadi rendah
49	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		9	Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Sebagian besar usia petani sudah lanjut	Budidaya pertanian perkebunan yang konvensional dan tradisional
	<b>Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan</b>					
50	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		6	Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Pemanfaatan lahan pertanian oleh petani yang tidak memperhatikan pedoman teknis budidaya	Tanaman tidak dapat tumbuh dengan optimal, sehingga produksi tidak optimal
51	Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif		6	Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	usia tanaman yang relatif tua dan rendahnya tingkat laju peremajaan tanaman	rendahnya tingkat produksi
52	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		4	Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Sebagian besar usia petani sudah lanjut	Budidaya pertanian perkebunan yang konvensional dan tradisional
	<b>Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau</b>					
53	Tingginya harga pupuk khusus tembakau		9	Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap sarana produksi	Produksi kurang optimal dan kurang memenuhi standart pasar
54	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		6	Seksi Tanaman Semusim dan Rempah	Sebagian besar usia petani sudah lanjut	Budidaya pertanian perkebunan yang konvensional dan tradisional
	<b>Pengembangan Pertanian Hortikultura</b>					
55	Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura		6	Seksi hortikultura	Kurangnya kemampuan ekonomi	Tingkat produksi yang rendah
56	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani		9	Seksi hortikultura	Keterbatasan sumberdaya manusia petani	Budidaya tanaman hortikultura yang relatif tradisional dan konvensional

a	b	c	d	e	f	g
	<b>Pengembangan Pertanian</b>					
57	Kurangnya kemampuan ekonomi		6	Seksi Tanaman Pangan	Kurangnya kemampuan ekonomi	Tingkat produksi dan produktivitas yang rendah
58	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani		6	Seksi Tanaman Pangan	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani	Budidaya tanaman pangan yang relatif tradisional dan
	<b>Operasional Balai Benih Pertanian</b>					
59	Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian		9	UPT Balai Benih Pertanian	Kurangnya pelatihan / Diklat/ Bintek	Kurangnya jumlah dan kualitas produksi benih BBP
60	Kurangnya jumlah SDM teknis perbenihan		9	UPT Balai Benih Pertanian	Terbatasnya jumlah SDM teknis perbenihan sesuai anggaran pemerintah	Terhambatnya proses produksi perbenihan tanaman di BBP
	<b>Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi</b>					
61	Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi		6	Subbag Perencanaan	Keterbatasan sumberdaya manusia pengelola	Data dan informasi yang kurang up to date

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**FORMULIR KERTAS KERJA**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2020							
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I</b>	<b>Penegakan integritas dan nilai etika</b>						
1	Terdapat PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja	Telah dilakukan pembinaan secara rutin kepada PNS untuk meningkatkan disiplin kerja	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan pegawai akan lebih terarah dan kontinyu untuk memastikan semua PNS menaati ketentuan jam kerja	Kepala Dinas	Triwulan I 2021
2	Belum adanya reward bagi PNS yang telah menaati ketentuan jam kerja	Telah diberikan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja	TE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Penyusunan SOP Pemberian Reward dan Punishment	Kepala Dinas	Triwulan I 2021

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas						
Tahun Penilaian		: 2020						
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pertanian dan Pangan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>								
1	Belum dikembangkannya komoditas unggulan daerah		Sudah mulai dilakukan pengembangan komoditas durian dengan pengusulan pelepasan varietas durian lokal Banyumas	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Balai Penelitian masing-masing komoditas	Kepala Daerah	Triwulan IV Tahun 2021
2	Rendahnya mutu pengolahan hasil pertanian		Telah dilaksanakan pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil pertanian dengan nara sumber dari Perguruan Tinggi	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan bimbingan, pendampingan dan pembinaan pengolahan hasil pertanian	Kepala Daerah	Triwulan IV Tahun 2021
3	Belum adanya cadangan pangan pemerintah daerah yang memadai		Mengusulkan anggaran bagi pengisian CPPD	TE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Kepala Daerah	Triwulan IV Tahun 2021
<b>II Risiko Strategis OPD</b>								
4	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan		Melakukan survey konsumsi energi dan protein secara kontinyu	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menambah jumlah petugas survey dan jumlah kegiatan survey	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021
5	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah		Mengusulkan anggaran bagi pengisian CPPD	TE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
6	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)		Melakukan sosialisasi pentingnya AUTP bagi perlindungan usaha tani	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memperluas jangkauan AUTP	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021
7	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman		Memberikan bantuan pestisida bagi petani	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Memberikan pelatihan membuat pestisida organik bagi petani	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021
8	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan		Membangun sumber-sumber air tanam dangkal dalam dan irigasi pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemetaan wilayah yang rawan kekeringan	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021
9	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif		Memberikan bantuan bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan peremajaan tanaman perkebunan dengan bibit bersertifikat	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021
10	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan		Melakukan pelatihan teknik budidaya tanaman pangan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelatihan teknik budidaya dilakukan secara intensif dengan metode yang sesuai	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021
11	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura		Melakukan sosialisasi tentang pasar komoditas hortikultura	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menjalin kemitraan dan peningkatan akses permodalan	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021
12	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang		Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan dan bintek dilakukan secara kontinyu	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
13	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis		Memberikan pembinaan kepada pelaku agribisnis	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan materi pengelolaan usaha agribisnis dalam kegiatan pembinaan	Kepala Dinas	Triwulan IV Tahun 2021
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>							
	<b>Penanganan Daerah Rawan Pangan</b>							
14	Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan		Melakukan kegiatan Peningkatan kemampuan SDM masyarakat	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan pelatihan ketrampilan agar masyarakat mempunyai mata pencaharian	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
15	Tidak tertanganinya masyarakat terdampak daerah rawan pangan		Melakukan koordinasi lintas OPD dalam penanganan masyarakat daerah rawan pangan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan bantuan bahan pangan bagi masyarakat di daerah rawan pangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
16	Kurangnya kemampuan produktif sumberdaya manusia		Melakukan kegiatan Peningkatan kemampuan produktif SDM	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengadakan pelatihan ketrampilan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk Pertanian</b>							
17	Kebutuhan masyarakat di lokasi TNI TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi		Melakukan penyusunan skala prioritas kebutuhan masyarakat di lokasi TMMD	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan paket sembako dengan harga murah sesuai kebutuhan masyarakat	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan</b>							
18	Kurang optimalnya kelembagaan Lumbung Pangan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat		Melakukan kegiatan peningkatan kemampuan SDM pengelola kelembagaan lumbung pangan dan LUPM	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengadakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan kelembagaan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>Pengembangan Cadangan Pangan Daerah</b>							
19	Terbatasnya gudang cadangan pangan pemerintah		Pengembangan gudang cadangan pangan pemerintah		Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan</b>							
20	Kurangnya sarana prasarana pengembangan pangan dan diversifikasi pangan		Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan pangan dan diversifikasi pangan		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi tentang diversifikasi pangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
21	Kurangnya respon masyarakat		Melakukan sosialisasi kegiatan pemanfaatan pekarangan dan diversifikasi pangan		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan bantuan bagi kegiatan pemanfaatan pekarangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
22	Kurangnya kemampuan petugas pengelola		Peningkatan kemampuan SDM Pengelola		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelatihan bagi tenaga pengelola	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
23	Minat kepesertaan lomba masih rendah		Melakukan sosialisasi lomba-lomba yang dilaksanakan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan sosialisasi lomba secara intensif	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Penyusunan Pola Pangan Harapan</b>							
24	Belum Tersusunnya Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan		Sudah dilaksanakan survey tetapi belum secara periodik	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan survey secara periodik	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>							
25	Kurangnya kesadaran masyarakat		Belum dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Mekanisasi Pertanian</b>							
26	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia Petani		Melakukan pelatihan penggunaan alsintan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang	Memperluas jangkauan pelatihan	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
27	Kurangnya pemanfaatan kelompok tani / kelembagaan petani		Melakukan pembinaan kelompok tani	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang	Melibatkan partisipasi aktif kelompok dalam pengelolaan alsintan	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
28	Rendahnya kesadaran pemeliharaan alat mesin pertanian		Menerapkan kebijakan pengelolaan alsintan melalui UPJA	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi kelompok tani yang mendapatkan bantuan alsintan	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian</b>							
29	Kekurangan air pertanian		Membangun sumber-sumber air tanah dangkal/dalam di areal pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu	Melakukan pemetaan wilayah yang kekurangan air	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
30	Masih banyaknya sawah tadah hujan		Pembangunan sarana irigasi	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembangunan sarana irigasi	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>DAK Pertanian</b>							
31	Kekurangan air pertanian		Membangun sumber-sumber air tanah dangkal/dalam di areal pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pemetaan wilayah yang kekurangan air	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
32	Masih banyaknya sawah tadah hujan		Pembangunan sarana irigasi	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembangunan sarana irigasi	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian</b>							
33	Kurangnya pelaksanaan Bintek dan pembekalan teknis bagi PPL		Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian dilakukan secara berkala	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
34	Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan Penyuluh Pertanian		Bimbingan dan Pelatihan bagi Penyuluh Pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan informasi terkait perkembangan teknologi budidaya	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
35	Kurangnya pelayanan Penyuluh Pertanian		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menggiatkan peran Penyuluh Pertanian dalam semua Program Dinas	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian dan Perikanan</b>							
36	Kurangnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam menyusun programa		Meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam penyusunan Programa	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menggali kebutuhan pelaku usaha tani	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian</b>							
37	Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP		Pemenuhan fasilitasi untuk kegiatan operasional BPP	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan bantuan sarana operasional BPP	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>Peningkatan Kemampuan Petani dan Lembaga Petani</b>							
38	Kurangnya partisipasi aktif dari petani		Meningkatkan partisipasi aktif petani dalam kegiatan kelompok tani	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberdayakan petani dan kelompok tani dalam kegiatan Dinas	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
39	Pengelolaan usaha anggota bersifat individual		Pembinaan dan pendampingan pengelolaan usaha	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelatihan Manajemen kelompok usaha petani	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP</b>							
40	Terbatasnya jumlah petugas penyuluh pertanian yang terampil		Memberikan pembekalan kepada Penyuluh Pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian dengan ketrampilan teknis yang memadai	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</b>							
41	Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT, Pelaku Agribisnis		Melakukan pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memperluas jangkauan pembinaan dan pelatihan	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
42	Kurang berkembangnya pelaku agribisnis		Melibatkan kelompok pelaku usaha agribisnis dalam kegiatan pameran	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</b>							
43	Kurangnya kesempatan pengamatan serangan OPT		Melibatkan petani dalam setiap kegiatan pendalian OPT	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan kegiatan pengendalian secara berkala	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
44	Menurunnya jumlah musuh alami OPT		Penerapan cara-cara pengendalian untuk meningkatkan populasi musuh alami OPT	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
45	Meningkatnya resistensi OPT		Melakukan pengendalian OPT dengan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
46	Tidak ada perubahan pola tanam sehingga siklus serangan tidak terputus		Sosialisasi penerapan pola tanam untuk pengendalian hama	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
47	Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu		Memberikan pelatihan pengenalan karakteristik OPT	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Kepala Bidang sarana Prasarana dan Perlintan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan</b>							
48	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya tanaman tahunan		Melakukan bimbingan teknis kepada petani	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Memberikan bantuan saprodi	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
49	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat		Sertifikasi tanaman unggul	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Bantuan bibit unggul bersertifikat	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
50	Terbatasnya kelompok tani komoditas perkebunan yang aktif		Pembinaan kepada kelompok tani	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendampingan secara intensif	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah</b>							
51	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		Melakukan bimbingan teknis kepada petani	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Memberikan bantuan saprodi	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
52	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat		Sertifikasi tanaman unggul	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Bantuan bibit unggul bersertifikat	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
53	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		Melakukan bimbingan teknis kepada petani	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan</b>							
54	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya		Melakukan bimbingan teknis kepada petani	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Memberikan bantuan saprodi	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
55	Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif		Peningkatan kemampuan produksi dan peremajaan tanaman cengkeh	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan pendampingan dalam budidaya	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
56	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		Melakukan bimbingan teknis kepada petani	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau</b>							
57	Tingginya harga pupuk khusus tembakau		Memberikan bantuan pupuk kepada petani	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan pendampingan dalam budidaya	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
58	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani		Peningkatan kemampuan manajemen usaha pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan	Kepala Bidang Perkebunan	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Pertanian Hortikultura</b>							
59	Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura		Peningkatan kemampuan manajemen usaha pertanian	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Memberikan bantuan saprodi kepada petani	Kepala Bidang TPH	Triwulan IV Tahun 2021
60	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani		Melakukan bimbingan teknis kepada petani	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Kepala Bidang TPH	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan</b>							
61	Kurangnya kemampuan ekonomi		Peningkatan kemampuan manajemen usaha pertanian	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan kemampuan manajemen usaha pertanian secara intensif	Kepala Bidang TPH	Triwulan IV Tahun 2021
62	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani		Melakukan bimbingan teknis kepada petani	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Kepala Bidang TPH	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Operasional Balai Benih Pertanian</b>							
63	Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian		Mengirimkan tenaga yang ada untuk mengikuti pelatihan budidaya pertanian	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Rekrutment tenaga teknis pertanian	Kepala UPT Balai Benih Pertanian	Triwulan IV Tahun 2021

a	b	c	d	e	f	g	h	i
64	Kurangnya jumlah SDM teknis perbenihan		Mengirimkan tenaga yang ada untuk mengikuti pelatihan perbenihan	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Rekrutment tenaga teknis perbenihan	Kepala UPT Balain Benih Pertanian	Triwulan IV Tahun 2021
	<b>Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi</b>							
65	Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi		Validasi data dan akurasi informasi	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pelatihan pengelolaan data dan informasi perencanaan	Kepala Subbag Perencanaan	Triwulan IV Tahun 2021

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2020  
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian  
 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pertanian dan Pangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Balai Penelitian masing-masing komoditas	Rapat/Surat	Balai Penelitian, Bappedalitbang	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
2	Melakukan bimbingan, pendampingan dan pembinaan pengolahan hasil pertanian	Rapat	Perguruan Tinggi, Balai Penelitian	Pelaku usaha agribisnis	Triwulan IV 2021		
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Rapat/Surat	Badan Ketahanan Pangan, Bulog, Bappedalitbang	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
4	Menambah jumlah petugas survey dan jumlah kegiatan survey	Rapat/Surat	Bappedalitbang	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
5	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Rapat/Surat	Badan Ketahanan Pangan, Bulog, Bappedalitbang	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
6	Menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memperluas jangkauan AUTP	Rapat/Surat	PT. Jasindo, Perbankan	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
7	Memberikan pelatihan membuat pestisida organik bagi petani	Rapat	Penyuluh Pertanian / POPT	Petani	Triwulan IV 2021		
8	Pemetaan wilayah yang rawan kekeringan	Rapat/Surat	Penyuluh Pertanian	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
9	Melakukan peremajaan tanaman perkebunan dengan bibit bersertifikat	Rapat/Surat	Dinpartan KP	Petani/kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
10	Pelatihan teknik budidaya dilakukan secara intensif dengan metode yang sesuai	Rapat	Dinpartan KP	Petani/kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
11	Menjalin kemitraan dan peningkatan akses permodalan	Rapat	Perbankan	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		

a	b	c	d	e	f	g	h
12	Pembinaan dan bintek dilakukan secara kontinyu	Rapat	Dinpartan KP	Petani/kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
13	Memberikan materi pengelolaan usaha agribisnis dalam kegiatan pembinaan	Rapat	Perguruan Tinggi, Balai Penelitian	Pelaku usaha agribisnis	Triwulan IV 2021		
14	Memberikan pelatihan ketrampilan agar masyarakat mempunyai mata pencaharian	Rapat	Praktisi	Kelompok masyarakat	Triwulan IV 2021		
15	Memberikan pelatihan ketrampilan agar masyarakat mempunyai mata pencaharian	Rapat	Praktisi	Kelompok masyarakat	Triwulan IV 2021		
16	Memberikan bantuan bahan pangan bagi masyarakat di daerah rawan pangan	Rapat	Dinpartan KP	Kelompok masyarakat	Triwulan IV 2021		
17	Memberikan paket sembako dengan harga murah sesuai kebutuhan masyarakat	Rapat	Pemerintah Desa	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
18	Mengadaan pembinaan dan pelatihan pengelolaan kelembagaan	Rapat	Dinpartan KP	LUPM	Triwulan IV 2021		
19	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Rapat/Surat	Badan Ketahanan Pangan, Bulog, Bappedalitbang	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
20	Melakukan sosialisasi tentang diversifikasi pangan	Rapat	Dinpartan KP	Masyarakat	Triwulan IV 2021		
21	Memberikan bantuan bagi kegiatan pemanfaatan pekarangan	Rapat	Dinpartan KP	Masyarakat	Triwulan IV 2021		
22	Pelatihan bagi tenaga pengelola	Rapat	Dinpartan KP	Masyarakat	Triwulan IV 2021		
23	Memberikan sosialisasi lomba secara intensif	Rapat	Dinpartan KP	Masyarakat	Triwulan IV 2021		
24	Melakukan survey secara periodik	Rapat/Surat	Masyarakat	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		

a	b	c	d	e	f	g	h
25	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan	Rapat	Dinpartan KP	Masyarakat	Triwulan IV 2021		
26	Memperluas jangkauan pelatihan	Rapat	Dinpartan KP	Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
27	Melibatkan partisipasi aktif kelompok dalam pengelolaan alsintan	Rapat	Dinpartan KP	Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
28	Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi kelompok tani yang mendapatkan bantuan alsintan	Rapat	Dinpartan KP	Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
29	Melakukan pemetaan wilayah yang kekurangan air	Rapat	Masyarakat	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
30	Pembangunan sarana irigasi	Rapat	Masyarakat	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
31	Melakukan pemetaan wilayah yang kekurangan air	Rapat	Masyarakat	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
32	Pembangunan sarana irigasi	Rapat	Masyarakat	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
33	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian dilakukan secara berkala	Rapat	Dinpartan KP	PPL	Triwulan IV 2021		
34	Memberikan informasi terkait perkembangan teknologi budidaya	Rapat	Dinpartan KP	PPL	Triwulan IV 2021		
35	Menggiatkan peran Penyuluh Pertanian dalam semua Program Dinas	Rapat	Dinpartan KP	PPL	Triwulan IV 2021		
36	Menggali kebutuhan pelaku usaha tani	Rapat/Surat	Pelaku usaha tani	Dinpartan KP	Triwulan IV 2021		
37	Memberikan bantuan sarana operasional BPP	Rapat/Surat	Dinpartan KP	BPP	Triwulan IV 2021		

a	b	c	d	e	f	g	h
38	Memberdayakan petani dan kelompok tani dalam kegiatan Dinas	Rapat	Dinpertan KP	Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
39	Pelatihan Manajemen kelompok usaha petani	Rapat	Dinpertan KP	Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
40	Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian dengan ketrampilan teknis yang memadai	Rapat	Dinpertan KP	PPL	Triwulan IV 2021		
41	Memperluas jangkauan pembinaan dan pelatihan	Rapat	Dinpertan KP	Pelaku usaha agribisnis	Triwulan IV 2021		
42	Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait	Rapat/Surat	Dinpertan KP	Pelaku usaha agribisnis	Triwulan IV 2021		
43	Melaksanakan kegiatan pengendalian secara berkala	Rapat	Dinpertan KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
44	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Rapat	Dinpertan KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
45	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Rapat	Dinpertan KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
46	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Rapat	Dinpertan KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
47	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Rapat	Dinpertan KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
48	Memberikan bantuan saprodi	Rapat	Dinpertan KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
49	Bantuan bibit unggul bersertifikat	Rapat	Dinpertan KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
50	Melakukan pendampingan secara intensif	Rapat	Dinpertan KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		

a	b	c	d	e	f	g	h
51	Memberikan bantuan saprodi	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
52	Bantuan bibit unggul bersertifikat	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
53	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
54	Memberikan bantuan saprodi	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
55	Memberikan pendampingan dalam budidaya	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
56	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
57	Memberikan pendampingan dalam budidaya	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
58	Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
59	Memberikan bantuan saprodi kepada petani	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
60	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
61	Peningkatan kemampuan manajemen usaha pertanian secara intensif	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
62	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Rapat	Dinperten KP	Petani / Kelompok Tani	Triwulan IV 2021		
63	Rekrutment tenaga teknis pertanian	Rapat	Dinperten KP	UPT Balai Benih Pertanian	Triwulan IV 2021		

a	b	c	d	e	f	g	h
64	Rekrutment tenaga teknis perbenihan	Rapat	Dinpertan KP	UPT Balai Benih Pertanian	Triwulan IV 2021		
65	Melakukan pelatihan pengelolaan data dan informasi perencanaan	Rapat	Pejabat Struktural Dinpertan KP	Subbag Perencanaan	Triwulan IV 2021		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2020  
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian  
 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pertanian dan Pangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Balai Penelitian masing-masing komoditas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
2	Melakukan bimbingan, pendampingan dan pembinaan pengolahan hasil pertanian	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
4	Menambah jumlah petugas survey dan jumlah kegiatan survey	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
5	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
6	Menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memperluas jangkauan AOTP	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
7	Memberikan pelatihan membuat pestisida organik bagi petani	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
8	Pemetaan wilayah yang rawan kekeringan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
9	Melakukan peremajaan tanaman perkebunan dengan bibit bersertifikat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
10	Pelatihan teknik budidaya dilakukan secara intensif dengan metode yang sesuai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
11	Menjalin kemitraan dan peningkatan akses permodalan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
12	Pembinaan dan bintek dilakukan secara kontinyu	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
13	Memberikan materi pengelolaan usaha agribisnis dalam kegiatan pembinaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
14	Memberikan pelatihan ketrampilan agar masyarakat mempunyai mata pencaharian	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
15	Memberikan pelatihan ketrampilan agar masyarakat mempunyai mata pencaharian	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
16	Memberikan bantuan bahan pangan bagi masyarakat di daerah rawan pangan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
17	Memberikan paket sembako dengan harga murah sesuai kebutuhan masyarakat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
18	Mengadakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan kelembagaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
19	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
20	Melakukan sosialisasi tentang diversifikasi pangan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		

a	b	c	d	e	f	g
21	Memberikan bantuan bagi kegiatan pemanfaatan pekarangan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
22	Pelatihan bagi tenaga pengelola	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
23	Memberikan sosialisasi lomba secara intensif	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
24	Melakukan survey secara periodik	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
25	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
26	Memperluas jangkauan pelatihan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
27	Melibatkan partisipasi aktif kelompok dalam pengelolaan alsintan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
28	Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi kelompok tani yang mendapatkan bantuan alsintan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
29	Melakukan pemetaan wilayah yang kekurangan air	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
30	Pembangunan sarana irigasi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
31	Melakukan pemetaan wilayah yang kekurangan air	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
32	Pembangunan sarana irigasi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
33	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian dilakukan secara berkala	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
34	Memberikan informasi terkait perkembangan teknologi budidaya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
35	Menggiatkan peran Penyuluh Pertanian dalam semua Program Dinas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
36	Menggali kebutuhan pelaku usaha tani	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
37	Memberikan bantuan sarana operasional BPP	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
38	Memberdayakan petani dan kelompok tani dalam kegiatan Dinas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
39	Pelatihan Manajemen kelompok usaha petani	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
40	Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian dengan ketrampilan teknis yang memadai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
41	Memperluas jangkauan pembinaan dan pelatihan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
42	Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
43	Melaksanakan kegiatan pengendalian secara berkala	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
44	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
45	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
46	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
47	Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
48	Memberikan bantuan saprodi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
49	Bantuan bibit unggul bersertifikat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
50	Melakukan pendampingan secara intensif	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
51	Memberikan bantuan saprodi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
52	Bantuan bibit unggul bersertifikat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
53	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
54	Memberikan bantuan saprodi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
55	Memberikan pendampingan dalam budidaya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
56	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
57	Memberikan pendampingan dalam budidaya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
58	Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
59	Memberikan bantuan saprodi kepada petani	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
60	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
61	Peningkatan kemampuan manajemen usaha pertanian secara intensif	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
62	Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
63	Rekrutment tenaga teknis pertanian	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
64	Rekrutment tenaga teknis perbenihan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
65	Melakukan pelatihan pengelolaan data dan informasi perencanaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester I		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2020  
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian  
 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pertanian dan Pangan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>										
1	Belum dikembangkannya komoditas unggulan daerah						Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Balai Penelitian masing-masing komoditas	Triwulan IV Tahun 2021		
2	Rendahnya mutu pengolahan hasil pertanian						Melakukan bimbingan, pendampingan dan pembinaan pengolahan hasil pertanian	Triwulan IV Tahun 2021		
3	Belum adanya cadangan pangan pemerintah daerah yang memadai						Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Triwulan IV Tahun 2021		
	Masalah/Risiko Baru: .....									
<b>II Risiko Strategis OPD</b>										
4	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan						Menambah jumlah petugas survey dan jumlah kegiatan survey	Triwulan IV Tahun 2021		
5	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah						Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Triwulan IV Tahun 2021		
6	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)						Menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memperluas jangkauan AUTP	Triwulan IV Tahun 2021		

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
7	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman						Memberikan pelatihan membuat pestisida organik bagi petani	Triwulan IV Tahun 2021		
8	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan						Pemetaan wilayah yang rawan kekeringan	Triwulan IV Tahun 2021		
9	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif						Melakukan peremajaan tanaman perkebunan dengan bibit bersertifikat	Triwulan IV Tahun 2021		
10	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan						Pelatihan teknik budidaya dilakukan secara intensif dengan metode yang sesuai	Triwulan IV Tahun 2021		
11	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura						Menjalin kemitraan dan peningkatan akses permodalan	Triwulan IV Tahun 2021		
12	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang						Pembinaan dan bintek dilakukan secara kontinyu	Triwulan IV Tahun 2021		
13	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis						Memberikan materi pengelolaan usaha agribisnis dalam kegiatan pembinaan	Triwulan IV Tahun 2021		
	Masalah/Risiko Baru: .....									
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>									
	<b>Penanganan Daerah Rawan Pangan</b>									
14	Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan						Memberikan pelatihan ketrampilan agar masyarakat mempunyai mata pencaharian	Triwulan IV Tahun 2021		
	Tidak tertanganinya masyarakat terdampak daerah rawan pangan						Memberikan bantuan bahan pangan bagi masyarakat di daerah rawan pangan			
	Kurangnya kemampuan produktif sumberdaya manusia						Mengadakan pelatihan ketrampilan			
	<b>Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk Pertanian</b>									
	Kebutuhan masyarakat di lokasi TNI TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi						Memberikan paket sembako dengan harga murah sesuai kebutuhan masyarakat			

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	<b>Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan</b>									
	Kurang optimalnya kelembagaan Lumbung Pangan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat						Mengadaan pembinaan dan pelatihan pengelolaan kelembagaan			
	<b>Pengembangan Cadangan Pangan Daerah</b>									
	Terbatasnya gudang cadangan pangan pemerintah						Melakukan koordinasi dengan instansi terkait			
	<b>Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan</b>									
	Kurangnya sarana prasarana pengembangan pangan dan diversifikasi pangan						Melakukan sosialisasi tentang diversifikasi pangan			
	Kurangnya respon masyarakat						Memberikan bantuan bagi kegiatan pemanfaatan pekarangan			
	Kurangnya kemampuan petugas pengelola						Pelatihan bagi tenaga pengelola			
	Minat kepesertaan lomba masih rendah						Memberikan sosialisasi lomba secara intensif			
	<b>Penyusunan Pola Pangan Harapan</b>									
	Belum Tersusunnya Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan						Melakukan survey secara periodik			
	<b>Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>									
	Kurangnya kesadaran masyarakat						Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan			
	<b>Pengembangan Mekanisasi Pertanian</b>									
	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia Petani						Memperluas jangkauan pelatihan			
	Kurangnya pemanfaatan kelompok tani / kelembagaan petani						Melibatkan partisipasi aktif kelompok dalam pengelolaan alsintan			

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Rendahnya kesadaran pemeliharaan alat mesin pertanian						Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi kelompok tani yang mendapatkan bantuan alsintan			
	<b>Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian</b>									
	Kekurangan air pertanian						Melakukan pemetaan wilayah yang kekurangan air			
	Masih banyaknya sawah tadah hujan						Pembangunan sarana irigasi			
	<b>DAK Pertanian</b>									
	Kekurangan air pertanian						Melakukan pemetaan wilayah yang kekurangan air			
	Masih banyaknya sawah tadah hujan						Pembangunan sarana irigasi			
	<b>Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian</b>									
	Kurangnya pelaksanaan BinteK dan pembekalan teknis bagi PPL						Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian dilakukan secara berkala			
	Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan Penyuluh Pertanian						Memberikan informasi terkait perkembangan teknologi budidaya			
	Kurangnya pelayanan Penyuluh Pertanian						Menggiatkan peran Penyuluh Pertanian dalam semua Program Dinas			
	<b>Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan Perikanan</b>									
	Kurangnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam menyusun program						Menggali kebutuhan pelaku usaha tani			

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	<b>Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian</b>									
	Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP						Memberikan bantuan sarana operasional BPP			
	<b>Peningkatan Kemampuan Petani dan Lembaga Petani</b>									
	Kurangnya partisipasi aktif dari petani						Memberdayakan petani dan kelompok tani dalam kegiatan Dinas			
	Pengelolaan usaha anggota bersifat individual						Pelatihan Manajemen kelompok usaha petani			
	<b>Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP</b>									
	Terbatasnya jumlah petugas penyuluh pertanian yang terampil						Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian dengan ketrampilan teknis yang memadai			
	<b>Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</b>									
	Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT, Pelaku Agribisnis						Memperluas jangkauan pembinaan dan pelatihan			
	Kurang berkembangnya pelaku agribisnis						Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait			
	<b>Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</b>									
	Kurangnya kesempatan pengamatan serangan OPT						Melaksanakan kegiatan pengendalian secara berkala			
	Menurunnya jumlah musuh alami OPT						Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu			

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Meningkatnya resistensi OPT						Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu			
	Tidak ada perubahan pola tanam sehingga siklus serangan tidak terputus						Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu			
	Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu						Melaksanakan kegiatan pengendalian hama terpadu			
	<b>Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan</b>									
	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya tanaman tahunan						Memberikan bantuan saprodi			
	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat						Bantuan bibit unggul bersertifikat			
	Terbatasnya kelompok tani komoditas perkebunan yang aktif						Melakukan pendampingan secara intensif			
	<b>Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah</b>									
	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya						Memberikan bantuan saprodi			
	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat						Bantuan bibit unggul bersertifikat			
	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani						Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif			
	<b>Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan</b>									
	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya						Memberikan bantuan saprodi			
	Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif						Memberikan pendampingan dalam budidaya			
	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani						Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif			

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	<b>Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau</b>									
	Tingginya harga pupuk khusus tembakau						Memberikan pendampingan dalam budidaya			
	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani						Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan			
	<b>Pengembangan Pertanian Hortikultura</b>									
	Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura						Memberikan bantuan saprodi kepada petani			
	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani						Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif			
	<b>Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan</b>									
	Kurangnya kemampuan ekonomi						Peningkatan kemampuan manajemen usaha pertanian secara intensif			
	Kurangnya kemampuan pengetahuan petani						Melakukan pendampingan kepada petani secara intensif			
	<b>Operasional Balai Benih Pertanian</b>									
	Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian						Rekrutment tenaga teknis pertanian			
	Kurangnya jumlah SDM teknis perbenihan						Rekrutment tenaga teknis perbenihan			

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	<b>Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi</b>									
	Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi						Melakukan pelatihan pengelolaan data dan informasi perencanaan			
	Masalah/Risiko Baru:									
	.....									

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Kolom h diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP)

Kolom i diisi dengan rencana pelaksanaan RTP

Kolom j diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP

Kolom k diisi dengan keterangan tambahan

LAMPIRAN II  
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
BANYUMAS TAHUN 2021

KRITERIA PENILAIAN RISIKO DALAM PENYUSUNAN RTP DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

1. Skala Kemungkinan Risiko

- a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgment*.
- b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
- c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
4	Sering Terjadi	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
5	Hampir Pasti Terjadi	Kemungkinan terjadi > 50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

- d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
  - 2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

## 2. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

### a. Beban Keuangan Negara

Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.

### b. Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

### c. Sanksi Hukum

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

### d. Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

### e. Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### f. Gangguan terhadap kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000,00	1
		Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi	
		Tidak material	
		Ancaman psikis	
		Agak mengganggu pelayanan ( $x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian)	
	Hambatan tertangani, tujuan tercapai		
2	Kecil	Kerugian Rp100.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	2
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan ( $5\% \leq x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental ringan	
	Kegiatan terhambat, kurang efisien		
3	Sedang	Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00	3
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup signifikan ( $15\% \leq x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental sedang	
	Kegiatan terhambat, kurang efektif		
4	Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00	4
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran serius sanksi tertulis	
		Terganggunya pelayanan secara signifikan ( $35\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental berat	
	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif		
5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp100.000.000,00	5
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum	
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan ( $x \geq 50\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Kematian	
	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai		

### 3. Skala Tingkat Risiko

- a) Kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran risiko;
- b) Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
- c) Matriks level risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.



